



**NOMOR 18**

**TAHUN 2011**

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);

MEMETUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KOTA CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kota adalah Kota Cirebon.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kota Cirebon.
7. Walikota adalah Walikota Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.
9. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Cirebon.
10. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
11. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
12. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan dalam negeri.
13. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
14. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.

15. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
16. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM**  
**BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan urusan wajib Kota tentang pelayanan pemerintahan dalam negeri.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan dalam negeri.

**Pasal 4**

Fungsi SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan pemerintahan dalam negeri;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;

- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan pemerintahan dalam negeri; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pemerintahan dalam negeri di Pemerintah Kota.

**BAB III**  
**SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

**Pasal 5**

Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintahan dalam negeri wajib berpedoman pada SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

**Pasal 6**

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini berkaitan dengan pelayanan pemerintahan dalam negeri yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 7**

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam negeri sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Dinas dan Kantor.

## Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam negeri sesuai SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## Pasal 9

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi Provinsi yang membidangi pemerintahan dalam negeri atas nama Gubernur dan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Kota.

## Pasal 10

Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan dalam negeri sesuai SPM.

**BAB V**  
**MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN**  
**SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

## Pasal 11

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan dalam negeri atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah Kota sesuai SPM yang telah ditetapkan;
- b. perencanaan pembangunan daerah pelayanan pemerintahan dalam negeri tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi daerah;

- c. melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM;
- d. mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan pemerintahan dalam negeri;
- e. melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan di bidang pemerintahan dalam negeri.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN**

## Pasal 12

Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam negeri sesuai SPM dan mekanisme kerjasama antar daerah Kabupaten dan Kota oleh Pemerintah Provinsi.

## Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Walikota ini dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan yang meliputi :

- a. perhitungan kebutuhan pelayanan pemerintahan dalam negeri sesuai SPM;
- b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
- c. penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan SPM; dan
- d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 14

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam negeri sesuai SPM.

BAB VIII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Dinas dan Kantor melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan pemerintahan dalam negeri sesuai SPM kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan pemerintahan dalam negeri untuk pencapaian target sesuai SPM dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 15 April 2011

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 18